

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana kapabilitas Pemerintah Provinsi Bali dalam mengidentifikasi kebijakan manajemen risiko penanggulangan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata, dengan menggunakan perspektif *dynamic governance*. Mengingat pandemi Covid-19 merupakan suatu bencana non-alam yang mengganggu banyak sektor kehidupan manusia, tak terkecuali sektor pariwisata akibat kurangnya aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan di luar rumah. Hal ini menjadikan tidak adanya seseorang yang melakukan perjalanan pariwisata yang mengakibatkan lumpuhnya pariwisata Bali. Tentu keadaan ini menjadi sangat buruk bagi pemerintah ataupun masyarakat Bali yang sangat bergantung terhadap sektor pariwisata sebagai sumber pemasukan. Untuk menanggulangnya, dibutuhkan kebijakan adaptif, strategi yang cepat tanggap dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga membutuhkan unsur kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*) dari pemimpin daerah ataupun *stakeholder* untuk merespon segala bentuk perubahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana model manajemen risiko yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Bali dalam penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata dari perspektif *dynamic governance*. Adapun kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemerintahan dynamic governance Neo dan Chen (2007) yang fokus pada komponen dasar berupa kapabilitas dinamis (*dynamic governance*). Dalam kapabilitas dinamis sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* serta terdapat dua unsur pengungkit yakni *able people* dan *agile process* untuk membuat *adaptive policy*. Kemudian penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan model deskriptif dan pendekatan studi kasus. Adapun periode pengambilan data Maret 2020 – April 2021. Sedangkan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen dan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis telah terdapat dalam kebijakan manajemen risiko dan strategi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di sektor pariwisata. Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata pemerintah telah mampu untuk membuat kebijakan yang adaptif. Terlihat dalam kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi perubahan lingkungan dan melakukan pemetaan (*thinking ahead*), pemerintah juga terus melakukan peninjauan ulang kebijakan dan keputusan yang sudah dilakukan disesuaikan dengan keadaan (*thinking again*), dan dalam rangka menyiasati kelumpuhan ekonomi pariwisata di Bali, pemerintah mampu mengadaptasi kebijakan dari lembaga lain serta melakukan inovasi kebijakan baru untuk diimplementasikan (*thinking across*). Sehingga menghasilkan *adaptive policy* hidup berdampingan dengan keadaan dengan protokol kesehatan.

Kata kunci: manajemen risiko, *adaptive policy*, *dynamic governance*, pandemi Covid-19, sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali

This study aims to explain the extent to which the Bali Provincial Government is capable of identifying risk management policies to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic on the tourism sector, using a dynamic governance perspective. Considering the Covid-19 pandemic is a non-natural disaster that disrupts many sectors of human life, the tourism sector is no exception due to the lack of human activity in carrying out activities outside the home. This makes the absence of someone who travels for tourism which results in the paralysis of Bali tourism. Of course this situation becomes very bad for the government or the Balinese people who are very dependent on the tourism sector as a source of income. To overcome this, adaptive policies are needed, strategies that are responsive and appropriate to the needs of the community, so that it requires elements of dynamic capabilities from regional leaders or stakeholders to respond to all forms of changes that occur. Based on this background, the research seeks to answer the question of how the risk management model developed by the Bali Provincial Government in overcoming the impact of the Covid-19 pandemic in the tourism sector from a dynamic governance perspective. The theoretical framework used in this research is the concept of dynamic governance, Neo and Chen (2007), which focus on the basic component in the form of dynamic governance. The dynamic capability itself consists of three main components, namely: thinking ahead, thinking again, and thinking across and there are two elements of leverage, namely able people and agile processes to make adaptive policies. Then the research was conducted using a qualitative method with a descriptive model and a case study approach. The data collection period is March 2020 - April 2021. Meanwhile, the data were collected using interview, observation, and document studies and analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and data conclusions. The results of the study show that dynamic capabilities have been contained in the risk management policies and strategies issued by the Bali Provincial Government in the context of overcoming the impact of the Covid-19 pandemic in the tourism sector. In order to overcome the impact of Covid-19 on the tourism sector, the government has been able to make adaptive policies. Seen in the government's ability to identify environmental changes and conduct mapping (thinking ahead), the government also continues to review policies and decisions that have been made adjusted to the situation (thinking again), and in order to deal with the paralysis of the tourism economy in Bali, the government is able to adapt policies from other institutions as well as innovating new policies to be implemented (thinking across). This results in an adaptive policy coexist with the state of the health protocol.

**Keywords:** risk management, adaptive policy, dynamic governance, Covid-19 pandemic, tourism sector, Bali Provincial Government